

DOMINASI KELOMPOK ETNIS TIONGHOA PADA BIDANG EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1986-2000

Khoirul Huda¹ dan Bobi Hidayat²

^{1,2} Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
Email: khoirulhuda@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study is to describe the background of the domination of Chinese ethnicity in the economic sector in Indonesia in 1986-2000. To describe the development of Chinese ethnic economic domination in Indonesia in 1986-2000. To analyze the impact of the domination of Chinese ethnic groups on the economic sector on the Indonesian economy in 1986-2000. This research method using heuristic, library study, and data interpretation method. This research was conducted at the UM Metro library by examining the literature on the economic dominance of Chinese Ethnicity in Indonesia through source criticism. The results of this study indicate that the presence of Chinese people in Indonesia in trading indirectly affects the economic situation of the Indonesian nation. Chinese people have high persistence and struggle in running the economy. This made the Chinese economy dominate the indigenous economy. As an example in various regions of Indonesia, the majority of large companies are controlled by the Chinese, especially the assets owned and many Chinese have invested in Indonesian companies. In addition, Chinese trade is also very dominant, it can be seen that large scale traders are dominated by Chinese people, such as jewelry traders, building shops, and electronics stores.

Keywords: Economic Domination, Chinese Ethnicity

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri banyak pulau mulai dari sabang sampai merauke. Wilayah yang sangat luas tersebut dihuni oleh banyak penduduk sehingga Indonesia kaya akan suku bangsa dan bahasa. Banyaknya suku bangsa di Indonesia memperkaya kebudayaan sekaligus memberikan warna dan corak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekayaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari luar salah satunya adalah Tionghoa. Suku bangsa Tionghoa merupakan salah satu suku atau etnis yang berasal dari luar. Sejak masa orde baru keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia telah resmi

Menurut Suryadinata (2010) bahwa "Orientasi Orde Baru pada ekonomi membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Tionghoa karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi." Pemerintah Soeharto benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Tionghoa, misalnya Sudono Salim. Motif di balik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Tionghoa di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Tionghoa perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan itu mempercepat kebangkitan kembali dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi.

Lambat laun, para konglomerat etnis Tionghoa menganggap dirinya sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Tionghoa lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak luar

negara menjadi poin istimewa kegiatan ekonomi etnis Tionghoa pada tahun-tahun ini. Kedigdayaan bisnis mereka bahkan mampu mengendalikan arah kebijakan penguasa (Tan, 1981).

Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Tionghoa kelas menengah dan atas.

Akumulasi kekayaan para konglomerat hitam juga terjadi karena jelang akhir kekuasaan Soeharto terjadi skandal perampokan Bank oleh sekelompok orang Tionghoa yang dikenal sebagai skandal BLBI. Bahkan Robinson (2005) menyebut telah terjadi konspirasi antara penguasa Orde Baru dengan sekelompok Tionghoa dan kapitalis dari Barat/Jepang yang sangat merugikan kelompok pengusaha pribumi Yahya dan Hamdan, 2008).

Akibatnya, kecemburuan sosial sentimen anti-Tionghoa muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti-Tionghoa dan anti-Jepang yang dikenal dengan peristiwa Malari. Gejala sosial yang dipicu “pribumi dan nonpribumi”, juga meletup di berbagai kota. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat perbedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusuhan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat etnis Tionghoa sebagai sasaran kebencian.

Setelah orde baru bergulir, banyak etnis Tionghoa yang mengalihkan aset-aset yang dimilikinya ke luar negeri, sambil membangun jejaring politik di dalam negeri dengan pejabat pemerintahan baru. Di awal pasca-Orde Baru, tepatnya di era Presiden Gus Dur, pengakuan eksistensi etnis Tionghoa mendapat porsi lebih besar. Segala ritual agama dan kebudayaan Tionghoa yang di masa Orde Baru dibatasi, kemudian dibebaskan. Salah satunya, ditetapkannya Hari Raya Tionghoa (Imlek) dan agama Konghucu oleh pemerintah. Demikian pula dari sisi ekonomi, bisnis etnis Tionghoa mendapatkan kegairahan kembali karena mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan dari negara.

Tak bisa dipungkiri, perilaku ekonomi etnis Tionghoa sepanjang sejarah memang masih dilema, peran ekonomi etnis Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Antara lain, yaitu: (a) kebobrokan ekonomi Indonesia adalah akibat banyaknya dana yang dibawa pengusaha etnis Tionghoa ke luar negara; (b) kolusi dan nepotisme menjadi kebiasaan pengusaha etnis Tionghoa yang mempengaruhi kepada kinerja para birokrat.

Menurut Airlangga (2016) hingga saat ini, etnis Tionghoa menguasai $\pm 70\%$ ekonomi nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi masa depan Indonesia. Secara formal, sebagian besar warga Tionghoa memang tak peduli urusan politik, tapi ketidakpeduliannya justru menjadikan mereka ‘bebas’ bermain apa saja, termasuk menjadi cukong dan investor politik.

Di masa kolonial, sebagian mereka menjadi kaki tangan Belanda, di era Orde Baru mereka hanya mempengaruhi Soeharto dalam bidang ekonomi. Namun di era Reformasi, mereka tidak saja mengatur dari belakang layar, tetapi juga tampil langsung mengatur kekuasaan. Perjalanan perekonomian Indonesia mengalami banyak tantangan dan hambatan. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade

1980. Pasca resesi di awal sampai pertengahan tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% per tahun. Namun ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% setelah 1987 sampai tahun 1994 (Tjiptohrijanto, 1997, 21).

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan dalam penelitian sejarah. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber baik dari buku maupun internet berupa jurnal-jurnal. Hasil penelusuran sumber yang sudah dilakukan diperoleh buku Negara dan Tionghoa oleh Leo Suryadinata, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia oleh Melly G Tan, Jurnal Dampak Ekonomi Etnis Tionghoa Era Reformasi oleh Susanto. Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber kajian yang berhubungan dengan dominasi etnis tionghoa dalam bidang ekonomi. Sumber-sumber yang dikumpulkan berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber lain yang relevan. Setelah sumber kajian terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian keabsahan sumber. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan kritik ekstern dan intern. Kegiatan yang dilakukan pada kritik ekstern adalah menguji kesejatan sumber bacaan apakah sumber itu asli atau telah disalin. Kegiatan pada kritik intern adalah mengkaji isi dari sumber yang ditemukan apakah telah relevan dengan isi.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan melakukan interpretasi data. Kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data adalah melakukan interpretasi data. Interpretasi data adalah menafsirkan, mengembangkan ide, dan memberikan pendapat terkait sumber yang dikaji. Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan laporan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menulis kajian-kajian atau fakta yang diperoleh ke dalam bentuk laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Masuknya Etnis Tionghoa

Kedatangan bangsa Tionghoa atau Tionghoa ke Indonesia pertama kali berorientasi hanya dalam bidang perdagangan. Orang Tionghoa merupakan imigran kelahiran Tiongkok yang tinggal di daratan Tionghoa dan menetap disana. Skinner (dalam Tan, 1981:1) menyatakan bahwa orang Tionghoa adalah imigran kelahiran Tiongkok atau keturunan imigran menurut garis laki-laki." Hal ini menandakan bahwa yang disebut Tionghoa adalah orang dari Tiongkok asli atau keturunannya yang ditandai dengan garis keturunan ayah atau patrilineal. Selanjutnya, menurut Ode (2012:120) menjelaskan bahwa "ada yang mengatakan bahwa orang-orang dari daratan Tionghoa sudah menginjakkan kakinya sejak 671 Masehi". Dari pendapat tersebut bahwa kedatangan orang Tionghoa sebenarnya sudah sejak lama, akan tetapi kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara pada mulanya hanya melewati atau sekedar lewat dan tinggal beberapa minggu atau bulan saja, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain.

Masa-masa awal kedatangan orang Tionghoa adalah hanya untuk berdagang atau bisnis. Ode (2012:122) menyebutkan bahwa kedatangan orang Tionghoa, terutama di Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, lebih bertujuan untuk kepentingan bisnis atau hubungan dagang.” Selanjutnya, ada yang menyebutkan bahwa awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada masa kerajaan adalah pada masa kejayaan Kerajaan Kutai di pedalaman kalimantan, atau Kabupaten Kutai, yang daerahnya kaya akan hasil tambang emas itulah mereka dibutuhkan sebagai pandai perhiasan (Emas). Karena kebutuhan akan pandai emas semakin meningkat, maka didatangkan emas dari Tionghoa daratan, disamping itu ikut dalam kelompok tersebut adalah para pekerja pembuat bangunan dan perdagangan. Mereka bermukim menyebar mulai dari Kabupaten Kutai, Sanggau Pontianak dan daerah sekitarnya.

Dominasi Ekonomi Etnis Tionghoa

Perekonomian memanglah faktor penentu keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Kondisi ekonomi yang baik akan mendorong pembangunan di dalam suatu negara. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala aspek kehidupan membutuhkan pembiayaan. Kemajuan ekonomi suatu Negara dapat dikatakan maju apabila warga negara memiliki suatu penghasilan yang cukup besar sehingga dapat ditentukan pendapatan perkapita baik disuatu provinsi maupun suatu wilayah tertentu.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan bersifat plural. Banyak suku bangsa yang menetap disuatu wilayah di Sebagian besar pulau-pulau di Indonesia. Suku bangsa atau etnis di Indonesia merupakan warga pendatang dan pribumi. Adanya berbagai suku bangsa tersebut maka kondisi ekonomi ditopang oleh bisnis dan perdagangan yang dimiliki oleh penduduk pribumi maupun penduduk pendatang. Menurut Ode (2012: 41) menyebutkan bahwa: Bidang Ekonomi, terutama sektor produksi serta perdagangan, baik secara domestik maupun ekspor-impor sampai saat ini masih dikuasai dan didominasi oleh kalangan etnis Tionghoa atau disebut dengan ECI. Sementara itu, etnis pribumi persentase penguasaan ekonominya relatif lebih kecil persentasenya.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perekonomian indonesia terutama di sektor industri yang memproduksi bahan-bahan jadi mayoritas dikuasai oleh etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa telah banyak memiliki perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia. Hal ini karena adanya peraturan pemerintah yang telah memberikan kebebasan hak kepada kaum Tionghoa maupun peranakan untuk mendapatkan hak naturalisasi kependudukan maupun hak untuk berdagang. Sebagaimana contoh di wilayah Kalimantan Barat seperti yang dikutip oleh Ode (2012:142) bahwa banyak perusahaan di wilayah Kalimantan yang dimiliki oleh orang Tionghoa. Berikut adalah tabel sepuluh perusahaan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa di wilayah Kalimantan.

Tabel 1. Data Perusahaan Milik Tionghoa di Indonesia

No	Jumlah PT	Nama Perusahanan	Pemilik Utama
1	23	PT Bumi Raya Utama	Adijanto
2	13	PT Benua Indah	Budiono Tan
3	7	PT Rokan	Yogi Setiawan
4	5	PT Alas Roban	Suhadi
5	5	Kalimantan Plantation Development	Achmad M. Astari
6	4	PT Batasan	Tan Tjik Hok
7	4	PT Hutan Raya	Alex Korompis

8	3	PT Rimba Ramin	Tian Hartono
9	3	PT Makmur	Edi Suwarjono
10	2	PT Satya Jaya Raya	Royson Lyman

Sumber: BKMPMD Provinsi Kalimantan (Ode, 2012: 142)

Berdasarkan Tabel di atas bahwa perusahaan yang ada dalam daftar di atas adalah perusahaan yang dimiliki oleh Tionghoa dan peranakan Tionghoa. Banyaknya jumlah perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di wilayah tersebut telah didominasi oleh etnis Tionghoa. Salah satu faktor dari dominasi ekonomi tersebut adalah kepemilikan HPH atau Hutan Per Hektar. Perusahaan tersebut memiliki luas area hutan yang memadai untuk persediaan produksi.

Selanjutnya, kondisi dominasi ekonomi etnis Tionghoa juga tidak hanya berada di Provinsi Kalimantan. Di Lampung kondisi perekonomian terutama dalam perusahaan atau skala industri juga banyak dikuasai oleh kaum Tionghoa. Menurut Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tionghoa (RRC) menyebutkan bahwa ada enam perusahaan besar Tionghoa telah berinvestasi di Lampung (Harianpilar.com)

Hal ini berarti bahwa saham perusahaan di Lampung sebagian besar adalah milik Tionghoa. Berarti perekonomian telah didominasi oleh orang Tionghoa. Enam perusahaan yang telah didominasi Tionghoa bergerak dibidang pengolahan makanan, minyak sawit, pembangkit listrik, ternak, dan pengolahan bijih baja. Berikut adalah beberapa pengusaha Tionghoa yang memiliki perusahaan besar di Indonesia: Eka Tjipta Wijaya, Liem Sioe Liong, Tahir (Ang Tjoen Ming), Hendra Rahardja (Tjan Tjoe Tjin), Mochtar Riyadi (Liu Wenzheng), Ciputra (Tjie Tjoe), dan William Soeryadjatjia Kian Liong.

Dominasi ekonomi etnis Tionghoa tidak hanya merambah pada sektor industri saja, melainkan pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan memanglah suatu bidang yang awal mulanya digeluti oleh etnis Tionghoa pada awal memasuki Indonesia. Perdagangan menjadi alternatif mata pencaharian yang menguntungkan dan memiliki prospek yang menjanjikan. Oleh sebab itu, masih banyak etnis Tionghoa yang menggantungkan hidupnya di perdagangan. Menurut Kakarisah (2011) bahwa Sektor perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling mencolok dari masyarakat etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia. Hal ini terlihat dari motivasi awal orang Tionghoa datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Pada masa pemerintahan kolonial. Belanda di Indonesia khususnya di Semarang mereka sangat berperan penting dalam bidang perdagangan dan industri. Pertokoan tekstil di Jalan Gang Warung, Toko obat-obatan Tionghoa dan apotek di Jalan Gang Warung, dan pusat perdagangan emas dan perhiasan.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perdagangan memang sangat berpotensi untuk dijalankan oleh setiap kaum pendatang karena lebih mudah dalam kepengurusan akses-akses perdagangan. Dibandingkan dengan kaum pribumi, etnis Tionghoa merupakan orang yang memiliki keuletan, kegigihan, dan ketelitian yang unggul. Tidak banyak kaum pribumi yang menjalankan bisnis perdagangan. Kaum pribumi yang menjadi pedagang misalnya para suku padang, batak, sunda, jawa, dan bugis. Mayoritas pedagang pribumi memiliki aset yang relatif kecil dibandingkan dengan etnis Tionghoa. Di Wilayah Lampung Sendiri dari Tahun 1986 sampai 2000 kondisi perekonomian masih didominasi oleh Etnis Tionghoa. Perekonomian dalam sektor perdagangan mayoritas adalah milik Tionghoa misalnya saja toko-

toko elektronik, perhiasan, dan toko bangunan adalah milik orang Tionghoa. (Radar Lampung.com). Menurut Suryadinata (2011: 95) bahwa diberlakukannya politik Benteng yang memprioritaskan penduduk pribumi dalam hal perdagangan dan kontra kerja, menyebabkan tertutupnya akses etnis Tionghoa dalam bisnis. Selain itu lisensi atau perizinan perdagangan mereka tidak diperpanjang lagi. Kebijakan ini dinilai diskriminatif dan membuat kaum Tionghoa meningkatkan solidaritas sesama etnis Tionghoa. Kemudian pada masa Orde Baru yakni pada masa Soeharto Politik Benteng dihapuskan sehingga membuka peluang bagi Etnis Tionghoa untuk memperluas bisnisnya.

Perekonomian Indonesia yang terus berkembang tidak akan luput dari berbagai pihak dalam mengembangkan kegiatan perekonomian. Semua kegiatan perekonomian seperti perindustrian, perdagangan, dan fiskal (Perbankan) tentunya ada campur tangan dari berbagai negara termasuk Tiongkok. Pada kenyataannya, Orang-orang Tionghoa banyak yang mengalirkan dana-dana ke Indonesia sebagai bagian dari investasi. Misalnya saja adalah PT Bank Tionghoa Cotruction Bank Indonesia Tbk (CCBI) merupakan salah satu Bank di Tionghoa yang mengucurkan kredit di Bank Indonesia.

Dampak Dominasi Ekonomi Etnis Tionghoa

Dampak yang dirasakan kaum pribumi terhadap meluasnya bisnis etnis Tionghoa di Indonesia. Dampak tersebut antara lain kecemburuan sosial. Hal ini karena kedekatan para pebisnis Tionghoa dengan pemerintahan, karena kedekatan Soeharto dengan pengusaha Tionghoa yang menjadi kroninya. Selain itu, hal ini menjadi pemicu permusuhan antara kaum pribumi, pemerintah dan pengusaha Tionghoa. Dampak yang dirasakan terhadap dominasi ekonomi etnis Tionghoa adalah kesenjangan hubungan sosial yang ada dalam lingkup perekonomian pribumi dengan etnis Tionghoa. Dalam Surat Harian Tempo (dalam Susanto, 2012) menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Maret 1990 Soeharto mengundang 31 Konglomerat (21 diantaranya adalah pengusaha Tionghoa) ke-ranch nya di Tapos. Dalam pidatonya Soeharto memnita kepada Konglomerat Tionghoa untuk menyumbangkan sahamnya sebanyak 25% kepada koperasi di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan upaya untuk mengatasi kecemburuan sosial yang sedang terjadi.

Masyarakat Tiongkok yang menetap di Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Meskipun demikian hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia bukan tanpa cela. Benih- benih persaingan antara masyarakat Indonesia dengan Tiongkok telah lama dirasakan. Pada tahun 1998 pernah terjadi kerusuhan di Solo dan Jakarta yang mana sasarannya adalah orang Tiongkok. Pasca dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tiongkok masih tetap tinggal dalam naungan negara Indonesia. Lahirnya Indonesia sebagai negara baru tidak banyak mempengaruhi aktivitas perdagangan kaum pedagang Tiongkok di Indonesia. Para pedagang-pedagang Tiongkok masih melakukan kegiatan perdagangan seperti biasanya. Namun demikian bibit-bibit rasis, sedikit-banyak masih tertanam dalam benak masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Tiongkok. Ketegangan antara orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari meluasnya jarak antara yang kaya dan yang miskin dalam negara serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam negara (Yahya dan Hamdan, 2008).

Munculnya perusahaan-perusahaan yang dikuasai etnis Tionghoa berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha pribumi untuk bekerjasama dalam korporatisasi perusahaan-perusahaan. Efek negatif yang muncul adalah semakin tajamnya persaingan usaha pribumi dan non pribumi. Dunia usaha di Indonesia, untuk sementara, tetap didominasi oleh para pengusaha Tionghoa karena modal, etos kerja, dan jaringan bisnis mereka sangat kuat di Asia. Isu menguatnya dominasi ekonomi oleh para taipan Tionghoa bukanlah hal baru, namun realitas itu sudah menjadi fakta yang kasat mata bahwa ekonomi Indonesia hampir pasti tidak mampu tumbuh tanpa peran mereka. Kaum bumiputera mengidap beban moral-material yang berat. Ada beban karena ketidakberdayaan.

Dampak revolusi Industri yang mampu membangkitkan Tiongkok pada kancah perekonomian dunia dirasakan pula oleh Indonesia. Hingga kini masyarakat Tiongkok telah menjadi bagian masyarakat Indonesia dan berbaur menjadi satu entitas budaya Indonesia. Namun, dominasi ekonomi khususnya perdagangan Tiongkok di Indonesia sangat kuat. Konsistensi Tiongkok dalam dunia perekonomian sesuai dengan prinsip ekonomi mereka yaitu perdagangan berguna untuk mencari keuntungan (laba) yang sebesar-besarnya terus diterapkan, sehingga prinsip ini menjadi simbol kekayaan yang dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial (Nugroho dan Rini, 2019). Terbukti status kelas sosial yang dituai dari prinsip ekonomi tersebut pernah dirasakan oleh masyarakat Tiongkok di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Tiongkok mampu menduduki strata di atas pribumi di bawah orang-orang Belanda. Menilik dari kesuksesan Tiongkok pada masa lampau, menghadapi Revolusi Industri 4.0, Tiongkok digadang sebagai pemimpin kekuatan dunia dimasa mendatang. Setelah tampuk kekuasaan dipegang oleh Amerika, Goldman memproyeksikan bahwa perekonomian terbesar tahun 2050 akan dipimpin oleh Tiongkok, disusul oleh AS dan India agak jauh di belakang, lalu Brazil, Meksiko, Rusia, dan Indonesia. Meskipun Indonesia diperkirakan masuk dalam sepuluh besar kekuatan perekonomian dunia, namun hal itu terjadi tentunya jika Indonesia benar-benar dapat memaksimalkan sumber daya alam dan manusia dengan baik.

Pekerja dan pasar menjadi kunci utama dalam terwujudnya digitalisasi ekonomi yang merupakan hasil Revolusi Industri 4.0. Fokus Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0 terjadi dalam sektor manufaktur, yaitu; (1) industri otomotif, (2) industri tekstil, (3) industri makanan dan minuman, (4) industri kimia, dan (5) industri elektronik. Mengutip dari pernyataan Menteri Industri, Airlangga menyatakan bahwa Revolusi 4.0 merupakan era di mana terjadi konektivitas secara nyata antara manusia, mesin dan data (Agi, 2018).

Dituntut kesiapan manusia dalam menghadapi konektivitas dengan mesin dan data. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masuk dalam lima besar dunia, maka Indonesia merupakan sasaran pasar yang empuk bagi produsen penghasil teknologi digital. Jika ditilik secara rinci, segala sesuatu yang dipakai oleh masyarakat Indonesia hampir semuanya berlabel “made in Tiongkok”. Dominasi Tiongkok dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia terjadi tanpa pernah terperhatikan. Apabila terus terjadi peningkatan konsumerisme tanpa dapat menjadi produsen kemungkinan Revolusi Industri 4.0 dapat menggilas Indonesia (Deni, 2018).

Dampak dominasi etnis tionghoa dalam bidang ekonomi ternyata dirasakan dalam bidang politik. Para pedagang etnis Tionghoa yang melebarkan dan mengembangkan bisnisnya maka ia harus menempuh jalan politik untuk memperoleh izin usaha dan kemudahan dalam bisnisnya. Dalam hal ini, tidak jarang para pedagang Tionghoa untuk mendekatkan diri dengan para pegawai pemerintahan. Secara politik, hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pegawai pemerintahan atau jabatan lainnya akan memperoleh dukungan dana dari para konglomerat Tionghoa. Tidak jarang para petinggi pemerintahan banyak merangkul pengusaha Tionghoa dibalik kejayaan mereka (Suryadi, 2019:10)

Selanjutnya bagi para pengusaha Tionghoa, kerjasama dengan pejabat negara sangat menguntungkan untuk kelancaran bisnisnya khususnya dalam hal perizinan usaha. Dengan pertimbangannya yang matang para pengusaha Tionghoa rela memberikan dukungan dana untuk prospek kedepannya. Hal ini tentu saja memperhitungkan keuntungan dan kemudahan yang ia dapat ketika menjalin relasi dengan para petinggi negara. Contohnya saja Liem Sioe Liong, dalam menjalankan bisnisnya ia merangkul Soeharto pada masa itu. Soeharto sebagai presiden RI pada masa itu, memiliki kedudukan yang menguntungkan untuk Liem. Ia menjadi penyalur dana untuk melakukan kampanye Soeharto dalam pemilu. Sebagai dukungan politiknya, ia memperoleh keuntungan berupa izin usaha dari Soeharto dan izin mendirikan berbagai perusahaan di wilayah Indonesia (Tan, 1981:79).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dominasi ekonomi etnis tionghoa maka dapat diambil simpulan historisnya bahwa kedatangan Orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan sekitar Tahun 671 Masehi. Awal mula kedatangannya adalah untuk kegiatan perdagangan. Orang Tionghoa berpendapat bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang baik sebagai tempat untuk kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu, kebanyakan orang Tionghoa yang ada di Indonesia memiliki mata pencaharian berdagang

Kehadiran orang Tionghoa di Indonesia dalam berdagang secara tidak langsung mempengaruhi keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Tionghoa memiliki kegigihan dan perjuangan yang tinggi dalam menjalankan roda perekonomian. Hal ini menjadikan ekonomi orang Tionghoa mendominasi perekonomian kaum pribumi. Sebagaimana contoh diberbagai wilayah indonesia perusahaan besar mayoritas dikuasai oleh kaum Tionghoa, terlebih aset-aset yang dimiliki dan banyak orang Tionghoa yang menanam saham di perusahaan Indonesia. Selain itu, perdagangan orang Tionghoa juga sangat mendominasi, hal ini dapat dilihat pedagang dalam skala besar banyak dikuasai oleh orang Tionghoa seperti pedagang perhiasaan, toko bangunan, dan toko elektronik..

DAFTAR PUSTAKA

Airlangga. 2016. Merajut Asa: *Membangun Industri dan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Economic

Indonedia. Vol 01. No. 01

Deni, Candra. 2018. Ekonomi Etnis Cina di Indonesia . *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 2(1).

- Nugroho dan Rini. 2019. *Tionghoa dalam Kehidupan di Indonesia*. Vol. 01. No. 03.
- Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sakina, Bunga. 2002. *Eksistensi masyarakat Tionghoa terhadap kehidupan berbangsa di Indonesia*(Diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 02.34)
- Sari, Nenden. 2019. *Etnis Tionghoa dan Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal No. 1. Vol. 01. ISSN: 1778-180
- Suryadi. 2015. Setitik Harapan Etnis Tionghoa dalam Minoritas di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Vo. 1. No. 2.
- Suryadinata Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Susanto. 2008. Dampak Ekonomi China Era Reformasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 2 (1).
- Tan Mely. 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Tjiptohrijanto, Prijono. 1997. *Migrasi Internasional*. Jakarta: Gramedia.